

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Penetapan sebuah standar akuntansi dilingkungan pemerintah dirasakan sangat penting, sebagai salah satu kunci transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan oleh sektor pemerintah. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan pemerintah harus memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders* agar terhindar dari kebiasaan karena kesalahan atas pengelolaan keuangan, baik itu berupa kesalahan atas pencatatan maupun penyelenggaraan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pemerintah.

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan

hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah No 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam standar akuntansi pemerintahan ini, menggunakan Basic Cash Toward Accrual (kas menuju akrual) dimana laporan realisasi anggaran yang berisi pendapatan dan belanja disajikan dengan basis kas, sedangkan laporan neraca yang berisi aset, ekuitas dana dan kewajiban disusun dengan menggunakan basis akrual.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti / penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas / setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam peraturan ini, bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama periode tertentu disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka Menteri dalam Negeri menetapkan peraturan Menteri dalam

Negeri (Permendagri) Nomor. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam system pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu dari basis kas menuju basis akrual penuh daam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh undang - undang keuangan Negara, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban serta bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Berdasarkan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan”. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Pelaporan berbasis akrual memungkinkan pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Berbagai penelitian tentang SAP No 71 tahun 2010 telah banyak dilakukan, namun focus penelitian tentang kendala dalam penerapan basis akrual pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dikatakan masih terbatas.

Salah satunya pemerintah daerah yang telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya adalah Pemerintah Kota Sibolga. Kota Sibolga adalah salah satu kotamadya di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sesuai dengan Permendagri No 64 tahun 2013, Pemerintah Daerah Kota Sibolga telah mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sejak tahun 2015. Namun, penerapan basis akrual dalam penyusunan LKPD kota Sibolga belum sepenuhnya sesuai dengan SAP yang berlaku, khususnya pada penyajian aset tetap dan Penyusutannya dalam Neraca.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada penyusunan laporan keuangan Kota Sibolga, dengan judul “ **Penerapan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga**”

1.2 Rumusan Masalah

Muri Yusuf, mengemukakan bahwa:

Masalah merupakan kesenjangan (gap) antara apa yang seharusnya ada dan apa yang terjadi ; atau antara apa yang diharapkan akan terjadi dan apa yang menjadi kenyataan.¹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada pemerintah kota Sibolga berdasarkan peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah mengetahui permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kota Sibolga terkait penerapan PP No 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Sibolga tahun anggaran 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti mengenai penerapan SAP berbasis akrual dan kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

¹ Muri Yusuf, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Prenamedia Mandiri, Jakarta, 2015, Hal.85

- b. Bagi pemerintah kota, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah yang menggunakan SAP berbasis akrual.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah yang menggunakan SAP berbasis akrual.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintah

Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Ada banyak ruang lingkup yang digarap didalam pencatatan pembukuan jenis ini, salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unnt pemerintah.

Menurut Dedi Nordiawan:

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas public atas dana dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.²

Jika disimpulkan dari dua pengertian diatas, maka defenisi akuntansi pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi.

Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

² Dedi nordiawan, dkk, **Akuntansi pemerintahan**: salemba empat, Jakarta, 2007, Hal 1.

a. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)

Tujuan pertanggungjawaban yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dan menteri keuangan atas nama pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan menteri dalam negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan atau/ milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya diterapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang undangan.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PSAP No.1 paragraf 8).fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan daya pada suatu entitas. Menurut Erlina dan Rasdianto, sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan selandia baru menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sector public. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai asset dan kewajiban.PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan PP No 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No.71 tahun 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, paragraf 39 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Dalam paragraf 40-41 kalau basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan

pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi itu terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Menurut Indra Bastian mengemukakan bahwa:

“Penerapan dasar akrual akan mempengaruhi system akuntansi yang digunakan seperti penambahan pos pos akrual dan berbagai formulir pembukuan”.³

Keunggulan dasar akrual dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasi berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa dasar akrual memberikan alat ukur atas barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, serta diperoleh; sementara dasar kas menyediakan alat ukur atas arus kas masuk dan kas keluar.

³ Indra Bastian. **Akuntansi sektor public**, Hal 313

2. Dasar akrual menunjukkan gambaran tentang pendapatan. Perubahan pendapatan yang diperoleh menurut dasar akrual dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
3. Dasar akrual dapat dijadikan alat ukur modal. Secara historis, nilai modal yang di investasikan dalam organisasi public akan berusaha dipertahankan. Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua acara yaitu:
 - a. Cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan diseluruh kementerian lembaga.
 - b. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan disemua kementerian/lembaga pada tahun 2015.

2.4 Perlakuan Akuntansi Berbasis Akrual

Perubahan basis kas menuju akrual (CTA) menjadi basis akrual tentunya akan berpengaruh dalam pencatatan transaksi pada satuan kerja pemerintah / kementerian / lembaga. Salah satu proses yang harus diperhatikan adalah perubahan pencatatan jurnal terhadap transaksi yang terjadi. Satuan kerja, sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib menyelenggarakan akuntansi,

penyusunan keuangan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu:

1. Jurnal anggaran merupakan pencatatan yang dilakukan untuk seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu.
2. Jurnal finansial merupakan jurnal untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran.

2.5 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengeluaran keuangan negara dalam hal ini termasuk keuangan daerah adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

SAP diterapkan dilingkungan pemerintahan, baik dipemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun dipemerintah daerah (Pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi

keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh stakeholders. Selain itu dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

Manfaat selanjutnya adalah kesinambungan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.6 Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2):

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

⁴ Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan dalam hal keuangan daerah dimana penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

2.7 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.7.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menerapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

Berbagai pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh para ahli:

Menurut Amran Manurung dan Halomoan Sihombing :

“laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dalam pengertiannya bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penganalisa data keuangan suatu organisasi.”⁵

Menurut S.Munawir :

“laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya interpretasi atau analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi pemakai informasi, untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dalam suatu perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui departemen keuangan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

⁵ Amran manurung dan Halomoan sihombing, **Analisis Laporan Keuangan** : UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN, Medan, Hal. 2

⁶ S. Munawir, **Analisis Laporan Keuangan**, edisi ke empat, cetakan ketujuhbelas: liberty, Yogyakarta, 2014, Hal .2

- 1) Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaannya.
- 2) Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan.

2.7.2 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

Secara umum pengertian penyusunan laporan keuangan adalah proses atau tahap-tahap yang dilakukan dalam membuat laporan Keuangan organisasi. Laporan keuangan adalah proses akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan dihasilkan dari masing masing organisasi perangkat daerah yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi / kota / kabupaten. Laporan keuangan OPD adalah suatu hasil proses yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak pihak yang memerlukannya. sistem akuntansi keuangan dapat dijelaskan melalui siklus akuntansi.

2.7.3 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

System akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahap tahap yang dilakukan dalam system akuntansi. Tahap tersebut meliputi: analisis transaksi, jurnal, posting ke

buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan dan jurnal penutup.

Dalam penyesuaian laporan keuangan pemerintah daerah masing masing organisasi pemerintah daerah memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan sebagai beban penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan dengan tahap tahap sebagai berikut.

1. Analisis Transaksi

Langkah awal dalam melakukan akuntansi untuk perkiraan – perkiraan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah (terutama penjurnalan) adalah melakukan analisis transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi, maka akan sulit menentukan perkiraan yang mana yang didebet dan mana yang dikredit, masing-masing elemen dari laporan keuangan dapat bertambah maupun berkurang.

Manfaat menganalisis transaksi:

- a. Mengetahui posisi keuangan dalam periode tertentu
- b. Menganalisa kelemahan perusahaan
- c. Mengetahui kelebihan yang dimiliki entitas
- d. Mengetahui langkah selanjutnya untuk pengambilan keputusan

2. Jurnal

Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi transaksi keuangan dengan menyebutkan yang ada didebet dan atau di kredit yang disertai jumlahnya masing masing. Jurnal merupakan sumber utama pencatatan.

Pencatatan dalam jurnal dilakukan merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh.

Menuru Erlina dan Rasdianto :

”Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit beserta jumlah dan referensinya masing masing,”⁷

Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peran perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat kebuku besar suatu perkiraan. Dengan bantuan jurnal, pencatatan, pencatatan ke masing masing perkiraan akan menjadi lebih mudah, sebab jurnal sudah memisahkan suatu perkiraan dalam debet dan kredit. Penjualan dapat dilakukan secara harian dan bulanan. Jurnal dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah :

1. Sistem Akuntansi Aktiva

Sistem akuntansi aktiva suatu jaringan prosedur yang dibuat untuk mengatur aktiva suatu entitas untuk menjaga kemerosotan kegunaan aset karena tanggungjawabnya.⁸

a. Aktiva lancar

Aktiva lancar dalam neraca perusahaan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan yang di bedakan dalam beberapa kegiatan rutin perusahaan seperti, memebrikan piutang kepada pemebeli atau konsumen,

⁷ Erlina ,dkk, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual**, cetakan ketiga: salemba empat, Medan, 2017, Hal. 361

⁸ Mujaki, Imam, dkk. **Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. COOLPAD, Elektronik Indonesia Pontianaka**. Jurnal Bianglala. 2017

pembelian bahan baku produksi,, gaji karyawan, pembayaran air dan listrik serta pembelian alat lainnya.⁹ Aktiva lancar umumnya dalam pemerintah daerah digolongkan menjadi : (a)Kas; (b)Piutang; (c)Persediaan

b. Aktiva tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintahan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih lebih dari satu tahun. Aktiva tetap dalam entitas pemerintah daerah umumnya digolongkan menjadi: Tanah, Jalan dan Jembatan, Bangunan air (irigasi), Kendaraan.

2. Sistem Akuntansi Utang/Kewajiban

Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggungjawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Keputusan pemerintah pusat/daerah untuk membeli aktiva dimana dengan sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang.

3. Sistem Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas/kegiatan operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan .

⁹ Dwi Krisyanto, Galih Purnama Siddik. **Pengaruh Aktiva Lancar dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas**. Jurnal investasi. 2018

4. Sistem Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva pemerintah pusat/daerah setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan, ekuitas dana dicadangkan, dan ekuitas dana donasi.

a. Ekuitas dana lancar

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aktiva lancar (kecuali donasi) dengan utang lancar, nilai ekuitas dana lancar dicatat sebesar selisih antara nilai aktiva lancar (kecuali donasi) dengan nilai utang lancar.

b. Ekuitas dana dicadangkan

Ekuitas dana dicadangkan merupakan dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada neraca. Nilai ekuitas dana dicadangkan dicatat sebesar dana cadangan pada neraca.

c. Ekuitas dana diinvestasikan

Ekuitas dana diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain lain (kecuali donasi dan cadangan), dengan jumlah utang jangka panjang.

d. Ekuitas dana donasi

Ekuitas dana donasi merupakan dana yang diperoleh dari pihak ketiga dalam bentuk hibah, bantuan, sumbangan, dan swadana masyarakat. Nilai ekuitas dana donasi dicatat sebesar jumlah hibah, bantuan, sumbangan, dan swadana masyarakat.

5. Sistem Akuntansi Belanja/Biaya

Biaya (expens) adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva/ekuitas neto, selain berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Beban berarti pengakuan biaya biaya non kas baik karena penyusutan, amortisasi, penyisihan atau cadangan, penyisihan persediaan maupun pemanfaatan persediaan itu sendiri.

Belanja diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu:

a. Belanja administrasi umum

Belanja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan aparatur yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan(asset).

b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public

Belanja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan public yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan(asset)

c. Belanja modal/investasi

Kegiatan belanja yang mengakibatkan penambahan kekayaan(asset)

d. Belanja transfer

Belanja untuk kegiatan amal tanpa mengharapkan pengembalian atau imbalan.

e. Belanja tak terduga

Belanja untuk kegiatan yang tidak dapat direncanakan dan bersifat luar biasa. (force major)

3. Posting Ke Buku Besar

Langkah selanjutnya setelah melakukan jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing masing perkiraan.

Menurut Halim:

“Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan(account). Rekening-rekening untuk mencatat secara terpisah pendapatan, belanja, pembiayaan, asset ,kewajiban dan ekuitas dana.”¹⁰

Menurut Erlina dan Rasdianto:

”posting merupakan proses memindahkan jumlah yang terdapat pada sisi debet dan sisi kredit keperkiraan buku besar yang bersangkutan.”¹¹

Menurut Durlan:

Darise “posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan sebauu tiap tiap data atau transaksi dibawa ke masing masing rekening yang sesuai.”¹²

Posting ke buku besar dapat dilakukan secara harian maupun bulanan. Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir.

4. Neraca Saldo

Menurut Erlina dan Rasdianto:

“Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/perkiraan buku besar.”¹³

¹⁰ Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, edisi ketiga, cetakan ketiga :salemba , Hal 62-63

¹¹ Ibid Hal. 362

¹² Nurlan darise, Akuntansi Keuangan Daerah, : Akuntansi Sektor Publik, cetakan pertama: indeks, Jakarta, 2008, Hal 44

Prosedur penjualan dan posting dilakukan selama satu periode akuntansi. Prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/perkiraan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara sistematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debet sama dengan saldo-saldo kredit. Namun keseimbangan bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Hasil penjumlahan neraca saldo harus menunjukkan angka yang sama atau keseimbangan jumlah debet dan kredit.

5. Jurnal Penyesuaian

Tahapan selanjutnya setelah neraca saldo adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian.

Menurut Erlina dan Rasdianto:

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari satu periode dengan periode lain.¹⁴

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah mempostingnya ke buku besar sesuai dengan rekening-rekeningnya. Setelah posting tersebut dilakukan, maka rekening rekening akan menunjukkan saldonya yang baru. Prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun

¹³ Op.cit Hal, 365.

¹⁴ Ibid, hal 365

setelah pembuatan jurnal jurnal penyesuaian. Dengan demikian saldo saldo rekening yang terdapat dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah rekening rekening setelah penyesuaian. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru ini juga akan dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

7. Laporan Keuangan

Setelah neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, kita bisa menggunakan alat bantu yang biasa disebut kertas kerja (worksheet). Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan keuangan yang dihasilkan sesuai manual.

Menurut Adanan Silaban dan Berliana Lumban Gaol:

Laporan keuangan merupakan hasil akhir (output) dari serangkaian kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, penyajian dan pengungkapan atau aktivitas bisnis manajemen, dan laporan keuangan harus menyajikan informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif, mengenai data atau informasi, yang wajib maupun pendukung yang bersifat sukarela yang berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan, dan laporan keuangan merupakan tujuan akhir yang akan dicapai dalam praktik akuntansi¹⁵.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

¹⁵ Adanan Silaban dan Berliana Lumban Gaol, **Teori Akuntansi**: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2019, Hal 53.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, social maupun politik dengan:

Menurut Deddy Nordiawan dan Ayuningtias Hertianti tujuan umum laporan keuangan adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mengenai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif, dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan,serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Kerangka konseptual PP No.71 tahun 2010 menyoroti bahwa setiap entitas pelapornya mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas;

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen ;

membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat

3. Transparansi;

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan

4. Keseimbangan antargenerasi;

membantu para pengguna dalam mengetahui kecakupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi kinerja;

mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) No.64 tahun 2013 menyatakan:

Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.¹⁶

Unsur-unsur yang dicakup secara langsung oleh pelaporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA; adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara/Bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hal pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja; adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum Negara/Bendahara umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan memperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer; adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas anggaran.
- d. pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan dan bagi hasil.
- e. Pembiayaan (*Financing*); adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013, Tentang **Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah**.Hal. 3.

kembali dana tau akan diterima, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

2. Neraca

Menurut peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 bahwa:

“Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.”¹⁷

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas.

Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Aset diklasifikasikan kedalam asset lancar dan asset non lancar. Suatu asset diklasifikasikan asset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan untuk dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, asset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai asset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi, investasi jangka pendek, piutang, persediaan. Aset non lancar mencakup asset yang bersifat jangka panjang dan asset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan

¹⁷ Peraturan pemerintah No.71 tahun 2010: **Standar Akuntansi Pemerintah**, lampiran I.01 kerangka konseptual-16

untuk masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat social dalam jangka waktu lebih dari satu tahun periode akuntansi. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan.

b. Kewajiban

Menurut Nurlan darise:

“ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar berupa sumber daya ekonomi pemerintah.”¹⁸

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang di sesuaikan dalam kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas diantara neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

¹⁸ Nurlan Darise .Op.Cit,Hal. 86.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam periode suatu pelaporan. Laporan operasional disajikan sekurang kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 laporan operasional menyajikan berbagai unsur: pendapatan - LO, beban, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/deficit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

a. Pendapatan-LO

Dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Beban transfer

Adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.

c. Surplus / defisit dari kegiatan operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

d. Surplus / defisit dari kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

e. Pos luar biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus / deficit sebelum pos luar biasa

f. Surplus / deficit LO

Surplus /defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus / defisit kegiatan operasional, dan kejadian luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan keuangan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan sebelumnya. disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal

b. Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: periode-periode sebelumnya dan koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang pada perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir

Contoh format laporan perubahan ekuitas disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian

dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kerangka konseptual PP No.71 tahun 2010 paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, menurut PSAP No.4 paragraf 14-16, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Informasi umum tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- e. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangannya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Fitri Ayu Lestari Dkk, (2014)	Analisis Penerapan PP No 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Amobagu.	Kota mobagu belum menerapkan pp no 71 tahun 2010, tapi telah sesuai dengan pp no 24 tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrual menyajikan laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran, sedangkan SAP berbasis akrual menyajikan 6 laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan modal ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan.

Wiryarningsih, dkk (2017)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standard Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Rumah Sakit Umum kabupaten Bangli.	Rumah sakit umum Bangli belum optimal dalam menerapkan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standard akuntansi berbasis akrual masih kurang dan belum mampu menerapkan system yang ada. Laporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi bertambah kuantitasnya hingga 7 laporan yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas , dan catatan atas laporan keuangan.
Chyntia Monica Sitanggang (2017)	Penerapan PP No.71 Tahun 2010 Dalam Pelaporan Akuntansi Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada tahun anggaran 2015 pada badan pengelola keuangan daerah kota medan telah menerapkan PP No.71 tahun 2010 dalam pelaporan akuntansi belanja. Belanja yang direalisasikan badan

		<p>pengelola keuangan daerah kota medan, diakui pada saat diterbitkannya surat perintah pencairan dana(SP2D), yang berarti keluarnya dari kas rekening kas umum daerah. Pencatatan akuntansi belanja pada badan pengelola keuangan daerah kota medan berdasarkan PP No 71 tahun 2010 disajikan dalam jurnal anggaran, jurnal finansial dan jurnal umum. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran pada badan pengelola keuangan daerah kota medan telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.</p>
--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan dimana dan kapan dilakukan. Objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah penerapan standar akuntansi pemerintah No 71 tahun 2010 berbasis akrual pada pemerintah kota Sibolga.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan prosedur penelitian terapan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan melihat laporan keuangan serta dokumen yang berkaitan dengan penerapan PP No 71 tahun 2010 berbasis akrual dalam penyusunan LKPD kota Sibolga. Wawancara dilakukan kepada kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) kota Sibolga, dan dokumentasi yang digunakan adalah LPKD (Laporan Pemeriksa Keuangan Daerah) kota Sibolga dan SAP berbasis Akrual.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, penulis menggunakan data proses penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai sumber daya pemerintah kota Sibolga terkait penyusunan laporan keuangan. Sedangkan data sekunder didapatkan penulis dari laporan keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2019 serta beberapa artikel yang relevan dengan penerapan basis akrual.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Study kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku literature yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan informasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan study kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Mempelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan pada masalah yang diteliti.
- b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lain.

2. Study Lapangan

Suatu cara pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan dilapangan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Sibolga. Studi lapangan dilakukan dengan cara:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode dokumentasi dalam penelitian yaitu melalui pencatatan atau foto copy data-data yang diperlukan. Data dokumentasi merupakan jenis data penelitian antara lain berupa: laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga.

b. Wawancara

Menurut sugiono, mengemukakan bahwa:

“Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.”¹⁹

c. Teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab langsung kepada petugas pada badan pengelola keuangan pendapatan dan asset daerah (BPKPAD) pemerintah kota sibolga, sehingga penulis

¹⁹ Sugiono, **Metode Penelitian**, edisi pertama, rajawali pers, jakarta, 2011, hal.20

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun data yang diperoleh adalah tahap-tahap penyusunan laporan keuangan pemerintah kota sibolga.

3.5 Metode Analisis Data

Berdasarkan topik penelitian ini, penulis melakukan pendekatan metode deskriptif.

Menurut Moh Nazir penelitian deskriptif yaitu:

“Suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.²⁰

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak Mengatakan bahwa:

“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif.”²¹

Dimana dalam penelitian penulis menganalisa data-data siklus akuntansi keuangan yang diperoleh sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam keterangan tentang masalah dan situasi yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁰ Moh.Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal.54.

²¹ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, Hal.19.